

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI PADA
MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL HUDA DESA BANJARSARI,
KECAMATAN NGAJUM, KABUPATEN MALANG)**

Khusnul Amin¹, Taher Alhabsji²
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang
Program Studi Administrasi Publik
Khusnul Amin
Email: khusnulamin013@gmail.com

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national flagship program mandated by Presidential Regulation No. 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional/BGN), intended to secure adequate nutritional intake for Indonesian learners at the primary and secondary levels. This article reports a case study of MBG implementation at Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mambaul Huda, located in Banjarsari Village, Ngajum District, Malang Regency, analyzed through George C. Edwards III's policy implementation framework, which specifies four interacting determinants of implementation success: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative case study design was employed, drawing on in-depth semi-structured interviews, passive participant observation, and documentary analysis involving four purposively selected informants: the head of the SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Malang Ngajum Banjarsari 3 unit, the headmaster of MI Mambaul Huda, a parent of a student beneficiary, and a student beneficiary. Data were processed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, and their credibility was strengthened through source and technique triangulation as well as member checking. Findings show that the communication and resource indicators are functioning relatively well: information about menus, schedules, and reporting flows through a combination of face-to-face coordination and a dedicated WhatsApp coordination group, while a designated school-level person in charge (PIC) and supporting teaching staff sustain day-to-day distribution. The disposition of implementing actors — teachers, the headmaster, SPPG staff, parents, and students — is consistently favorable toward the program. The bureaucratic-structure indicator, by contrast, reveals a gap between practice and formal procedure: no written, standardized Standard Operating Procedure (SOP) yet exists, even though quality-control routines such as delivery receipts and organoleptic assessment sheets are consistently applied in the field. The principal inhibiting factors are limited menu variation caused by inconsistent access to quality raw materials and occasional delays in distribution timing. The study concludes that MBG implementation at this rural madrasah is substantively sound but procedurally under-formalized, and it recommends that the managing SPPG unit codify a written SOP, diversify its supplier base, and that the school sustain its current coordination practices while strengthening direct communication channels with parents.

Keywords: *policy implementation, free nutritious meals program, Edwards III model, rural madrasah, food and nutrition service governance*

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan nasional yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), dengan sasaran menjamin asupan gizi memadai bagi peserta didik jenjang dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Artikel ini melaporkan hasil studi kasus mengenai pelaksanaan Program MBG di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mambaul Huda, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, yang dianalisis melalui kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang merumuskan empat determinan implementasi yang saling berinteraksi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif, dengan penggalan data melalui wawancara semi-terstruktur mendalam, observasi partisipan pasif, dan penelusuran dokumen terhadap empat informan yang dipilih secara purposif, yakni Kepala unit SPPG Malang Ngajum Banjarsari 3, Kepala MI Mambaul Huda, seorang wali murid penerima manfaat, dan seorang siswa penerima manfaat. Data diproses menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dan keabsahannya diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking. Temuan menunjukkan bahwa indikator komunikasi dan sumber daya berjalan relatif baik: informasi mengenai menu, jadwal, dan pelaporan mengalir melalui kombinasi koordinasi tatap muka dan grup WhatsApp khusus, sementara penunjukan Penanggung Jawab (PIC) di tingkat sekolah beserta dukungan tenaga pengajar menopang kelancaran distribusi harian. Disposisi para pelaksana — guru, kepala madrasah, staf SPPG, wali murid, dan siswa — secara konsisten bersifat positif terhadap program. Sebaliknya, indikator struktur birokrasi memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik dan formalitas prosedur: belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang baku, meskipun rutinitas pengendalian mutu seperti bukti serah terima dan lembar uji organoleptik telah diterapkan secara konsisten di lapangan. Faktor penghambat utama adalah terbatasnya variasi menu akibat ketidakstabilan akses terhadap bahan baku berkualitas serta keterlambatan waktu distribusi pada momen-momen tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi MBG pada madrasah pedesaan ini secara substansial telah berjalan baik namun masih kurang terformalisasi secara prosedural, sehingga direkomendasikan agar unit SPPG pengelola menyusun SOP tertulis, memperluas basis pemasok, serta pihak sekolah mempertahankan praktik koordinasi yang telah berjalan sambil memperkuat saluran komunikasi langsung kepada wali murid.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, program makan bergizi gratis, model Edwards III, madrasah pedesaan, tata kelola pelayanan gizi*

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menempatkan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai dua dari sejumlah tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua tujuan tersebut secara langsung bersinggungan dengan isu pemenuhan gizi anak, sebab status gizi yang baik pada usia dini dan usia sekolah menjadi fondasi bagi tumbuh-kembang kognitif serta kapasitas belajar generasi penerus bangsa. Ketika asupan gizi anak tidak terpenuhi secara memadai, dampaknya tidak berhenti pada persoalan kesehatan individual semata, melainkan merembet pada penurunan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan gizi di Indonesia masih jauh dari tuntas. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 mencatat angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,6 persen, turun dari 24,4 persen pada tahun sebelumnya namun tetap berada di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni di bawah 20 persen. Situasi ini diperburuk oleh fenomena beban gizi ganda (double burden of malnutrition), yang menggabungkan persoalan kekurangan gizi

dengan persoalan gizi lebih dan defisiensi zat gizi mikro secara bersamaan pada populasi yang sama. Anak usia sekolah dasar tergolong kelompok yang paling rentan, karena pada rentang usia tersebut kebutuhan gizi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak berada pada titik yang sangat tinggi.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan serentak pada 6 Januari 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Payung hukum program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional. Program MBG menyasar peserta didik jenjang PAUD hingga SMA/ sederajat serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan proyeksi jangkauan sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025 dan dukungan anggaran yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai kebijakan nasional yang bersifat top-down, keberhasilan MBG pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana ia diterjemahkan di tingkat satuan pendidikan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan.

Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan struktural dalam pemenuhan gizi anak, mengingat mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan pendapatan berkisar Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 per keluarga per bulan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mambaul Huda, sebagai satuan pendidikan Islam swasta berbasis masyarakat yang berdiri sejak 1968 dan melayani 140 peserta didik, menjadi salah satu lokus penerima manfaat MBG yang beroperasi di bawah pengelolaan unit SPPG Malang Ngajum Banjarsari 3.

Kajian atas implementasi MBG di madrasah pedesaan menjadi penting karena karakteristik kelembagaan madrasah swasta berbasis masyarakat berbeda secara signifikan dari sekolah negeri di kawasan perkotaan, baik dari sisi ketersediaan sumber daya, pola komunikasi antaraktor, maupun mekanisme kelembagaan yang melingkupinya. Studi terdahulu mengenai kesiapan satuan pendidikan menyambut MBG di Jawa Timur bahkan menunjukkan bahwa madrasah cenderung memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih rendah dibanding sekolah umum, meski unggul pada dimensi kesiapan sosial dan komunitas. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian empiris yang secara spesifik menyoroti dinamika implementasi kebijakan gizi

nasional pada konteks madrasah pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana implementasi Program MBG berlangsung di MI Mambaul Huda Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang apabila dianalisis melalui empat indikator model Edwards III; dan (2) faktor-faktor apa saja, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, yang memengaruhi jalannya implementasi tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Program MBG di lokus penelitian, sekaligus mengidentifikasi determinan keberhasilan dan hambatannya, agar dapat menyumbangkan rekomendasi yang aplikatif bagi penyempurnaan program di tingkat operasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sejumlah kajian terdahulu memberikan konteks dan pijakan bagi penelitian ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Fitriani dan Hasanah (2022) meneliti pendahulu MBG, yaitu Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS), di Kabupaten Malang menggunakan kerangka Edwards III pada sekolah dasar negeri. Nurhayati (2022)

menelusuri peran sosial madrasah ibtidaiyah swasta dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Malang melalui pendekatan etnografis. Hidayat dan Wulandari (2024) mengkaji tahap awal implementasi MBG secara nasional melalui desk research dan diskusi kelompok terpumpun. Setyawati dan Purnomo (2021) mengevaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan di Kecamatan Kepanjen menggunakan model evaluasi CIPP. Wijayanto dan Azizah (2024) melakukan survei terhadap 320 kepala sekolah/madrasah di Jawa Timur, menemukan bahwa satuan pendidikan berbasis keagamaan unggul pada dimensi kesiapan sosial-komunitas meski tertinggal pada dimensi infrastruktur. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara program MBG (bukan program pendahulunya), lokus madrasah swasta pedesaan tunggal, dan pendekatan studi kasus mendalam yang menelusuri proses implementasi pascapeluncuran program.

2.2 Kebijakan Publik dan Tahapan Implementasinya

Kebijakan publik dipahami secara beragam oleh para ahli, namun benang merahnya konvergen pada gagasan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan (atau ketidaktindakan) yang diambil otoritas pemerintah untuk merespons persoalan publik demi mencapai tujuan tertentu (Dye,

1981; Dunn, 2003; Anderson, 1979). Dunn (2003) menguraikan siklus kebijakan publik ke dalam lima tahap: penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Implementasi menempati posisi sentral karena menjadi titik konversi antara keputusan politik dan hasil nyata yang dirasakan kelompok sasaran. Program MBG, sebagai kebijakan yang baru diluncurkan pada awal 2025, saat ini berada pada tahap implementasi aktif yang masih terus disempurnakan, sehingga kajian pada tahap ini memiliki relevansi praktis yang tinggi.

Van Meter dan Van Horn (1975) memandang implementasi sebagai tindakan individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang memuat identifikasi masalah, tujuan, dan struktur proses pelaksanaannya, sementara Ripley dan Franklin (1986) memandangnya sebagai segala sesuatu yang terjadi setelah otorisasi program diberikan hingga berujung pada keluaran nyata bagi kelompok sasaran.

2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan Edwards III (1980) sebagai kerangka analisis

utama, karena model ini secara spesifik dirancang untuk mengidentifikasi variabel-variabel operasional yang menentukan keberhasilan implementasi pada level pelaksana lapangan. Model ini mengidentifikasi empat indikator yang saling berinteraksi dan dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi.

Indikator pertama, komunikasi, menyoroti bagaimana keputusan kebijakan disalurkan kepada para pelaksana melalui tiga dimensi: transmisi (penyampaian informasi kepada pihak yang tepat), kejelasan (pesan yang tidak ambigu), dan konsistensi (tidak adanya perintah yang saling bertentangan). Indikator kedua, sumber daya, mencakup empat komponen, yaitu staf yang memadai secara jumlah dan kompetensi, informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, wewenang formal untuk bertindak, serta fasilitas fisik yang mendukung pelaksanaan. Indikator ketiga, disposisi, merujuk pada kemauan dan komitmen para pelaksana kebijakan, yang dipengaruhi oleh pemahaman terhadap tujuan kebijakan, penerimaan terhadapnya, dan intensitas respons pelaksana. Indikator keempat, struktur birokrasi, menyoroti sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia bersifat jelas namun tidak kaku, serta bagaimana fragmentasi

tanggung jawab antarunit dapat dihindari melalui koordinasi yang solid.

Keempat indikator tersebut saling memengaruhi secara sistemik dan digunakan dalam penelitian ini sebagai kategori analitis untuk memetakan bagaimana Program MBG diterjemahkan menjadi praktik operasional harian di MI Mambaul Huda, mulai dari penyampaian informasi menu hingga mekanisme pengendalian mutu makanan yang diterima peserta didik.

2.4 Kerangka Berpikir

Program Makan Bergizi Gratis, sebagai kebijakan publik yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, diimplementasikan di MI Mambaul Huda Desa Banjarsari melalui mekanisme kerja unit SPPG Malang Ngajum Banjarsari 3. Proses implementasi tersebut dianalisis melalui empat variabel Edwards III secara simultan, yang interaksinya menghasilkan pemahaman mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengikuti pandangan Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna

yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Pendekatan ini dipilih karena implementasi kebijakan merupakan fenomena yang sarat proses, interaksi antaraktor, dan pemaknaan kontekstual yang sulit ditangkap secara memadai hanya melalui pengukuran kuantitatif. Sifat deskriptif penelitian ini, merujuk Sukmadinata (2011), diarahkan untuk menggambarkan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antarproses implementasi MBG secara sistematis dan faktual sebagaimana adanya di lapangan.

3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan situs penelitian utama di MI Mambaul Huda. Pemilihan lokus ini didasarkan pada tiga pertimbangan: pertama, MI Mambaul Huda merupakan salah satu satuan pendidikan resmi penerima manfaat MBG di wilayah Kecamatan Ngajum; kedua, sebagai madrasah swasta berbasis masyarakat pedesaan, karakteristiknya berbeda dari sekolah negeri perkotaan sehingga memberikan perspektif yang belum banyak digali dalam penelitian sejenis; ketiga, aksesibilitas lokasi memungkinkan peneliti melakukan pengamatan dan wawancara mendalam secara berkelanjutan. Fokus penelitian mencakup dua hal pokok, yaitu proses implementasi MBG yang dikaji melalui empat indikator Edwards III

(komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi), serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi baik yang bersumber dari internal organisasi pelaksana maupun dari lingkungan eksternal.

3.3 Sumber Data dan Informan

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap empat informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai implementasi MBG, yaitu dua informan kunci (Kepala SPPG Malang Ngajum Banjarsari 3 selaku pengelola operasional produksi-distribusi, dan Kepala MI Mambaul Huda selaku penanggung jawab kelembagaan sekolah) serta dua informan pendukung (wali murid selaku penerima manfaat tidak langsung, dan siswa selaku penerima manfaat langsung). Data sekunder diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dokumen profil kelembagaan MI Mambaul Huda, catatan distribusi makanan, dan dokumentasi menu harian.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik triangulatif: wawancara semi-terstruktur mendalam (45–90 menit per sesi), observasi partisipan pasif terhadap proses distribusi dan konsumsi makanan, serta

dokumentasi arsip dan catatan program. Keabsahan data diuji melalui empat kriteria Lincoln dan Guba (1985): kredibilitas (triangulasi sumber, teknik, dan waktu; member checking), transferabilitas (deskripsi tebal atas konteks), dependabilitas (audit trail), dan konfirmabilitas (penyajian bukti data yang transparan).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang berlangsung simultan dengan pengumpulan data, terdiri atas kondensasi data (pengkodean dan pengelompokan tema sesuai variabel Edwards III), penyajian data (narasi deskriptif dilengkapi kutipan verbatim dan matriks perbandingan antarinforman), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara iteratif melalui pemeriksaan silang data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Objek Penelitian

MI Mambaul Huda merupakan madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama yang telah berdiri sejak 1968, saat ini melayani 140 peserta didik dengan dukungan 10 tenaga pengajar. Unit SPPG Malang Ngajum Banjarsari 3 resmi beroperasi sejak 18 Mei 2026 dan bertanggung jawab atas pemenuhan gizi harian bagi 1.831 peserta didik yang tersebar di 19 satuan pendidikan wilayah Kecamatan Ngajum, menjadikan MI Mambaul Huda salah satu dari sekian banyak

titik layanan yang harus dikelola secara serentak oleh satu unit SPPG yang sama.

4.2 Komunikasi

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa penyampaian informasi Program MBG kepada MI Mambaul Huda berlangsung melalui dua jalur utama yang saling melengkapi. Jalur pertama berupa pertemuan tatap muka langsung antara Kepala SPPG dan Kepala Madrasah untuk membahas hal-hal teknis dan strategis. Jalur kedua berupa grup percakapan digital bernama “Koordinasi SPPG & PIC Sekolah & Kader” yang beranggotakan 39 orang, memuat pembaruan berkala mengenai menu harian, jadwal distribusi, serta pelaporan pelaksanaan. Ketiga informan kunci dan pendukung menyampaikan keterangan yang konsisten mengenai eksistensi dan fungsi kedua jalur tersebut, yang mengindikasikan bahwa transmisi informasi antara SPPG dan pihak sekolah relatif terjaga akurasinya.

Namun demikian, pola komunikasi kepada wali murid menunjukkan karakteristik yang berbeda. Wali murid yang menjadi informan penelitian menyampaikan bahwa sebagian besar informasi mengenai program, termasuk detail menu harian, diperolehnya secara tidak langsung melalui penuturan anaknya sepulang sekolah, bukan melalui saluran komunikasi resmi dari sekolah atau SPPG. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi

antarlembaga pelaksana (SPPG-sekolah) telah terjalin baik, komunikasi kepada kelompok penerima manfaat tidak langsung seperti orang tua belum sepenuhnya terstruktur secara formal. Merujuk pada dimensi kejelasan dan konsistensi yang digariskan Edwards III (1980), kesenjangan semacam ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pihak pelaksana dan keluarga penerima manfaat, meskipun dalam praktiknya belum menimbulkan hambatan berarti karena tingginya tingkat kepercayaan wali murid terhadap pihak sekolah.

4.3 Sumber Daya

Dari sisi sumber daya manusia, MI Mambaul Huda menunjuk seorang Penanggung Jawab (PIC) yang bertugas menerima makanan dari SPPG, memeriksa kesesuaian jumlah omprang dengan jumlah peserta didik, mencatat surat jalan sebagai bukti serah terima, dan mengoordinasikan distribusi ke masing-masing kelas. Peran ini didukung oleh guru kelas yang secara aktif mendampingi siswa selama waktu makan berlangsung, sehingga proses distribusi tidak bertumpu pada satu individu semata melainkan melibatkan kolaborasi antarpersonel sekolah. Pada sisi SPPG, pelaksanaan operasional didukung oleh tim yang terdiri atas Kepala SPPG, staf produksi, dan relawan, dengan pembagian tugas yang

relatif jelas antara fungsi produksi dan fungsi distribusi.

Selain sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan adanya instrumen administratif pendukung berupa surat jalan atau bukti serah terima dan lembar uji organoleptik, yang berfungsi sebagai perangkat verifikasi kuantitas sekaligus pengendalian kualitas makanan yang didistribusikan. Ketersediaan instrumen ini menunjukkan bahwa aspek informasi dan fasilitas pendukung, sebagaimana disyaratkan Edwards III (1980), telah terpenuhi secara memadai pada level operasional sekolah, meskipun penelitian ini tidak menemukan bukti mengenai besaran anggaran operasional secara rinci yang dialokasikan untuk masing-masing satuan pendidikan.

4.4 Disposisi

Sikap para pelaksana terhadap Program MBG di MI Mambaul Huda secara konsisten menunjukkan kecenderungan positif dari berbagai perspektif informan. Kepala Madrasah dan guru merespons program dengan antusiasme, tercermin dari keterlibatan aktif guru kelas dalam mendampingi kegiatan makan bersama. Wali murid mengamati adanya perubahan semangat anaknya untuk berangkat ke sekolah sejak program berjalan, sementara siswa sendiri menunjukkan penerimaan yang tinggi terhadap makanan yang diterima, yang

tercermin dari berkurangnya kebutuhan untuk membeli jajanan tambahan pada waktu istirahat.

Masukan kritis mengenai variasi menu dari beberapa informan tidak mencerminkan resistensi, melainkan justru menunjukkan keterlibatan dan harapan tinggi terhadap keberlanjutan program. Dalam kerangka Edwards III (1980), disposisi positif semacam ini merupakan modal penting yang memperbesar peluang keberhasilan implementasi, karena pelaksana yang memahami dan menerima tujuan kebijakan cenderung menjalankannya sesuai maksud pembuat kebijakan.

4.5 Struktur Birokrasi

Berbeda dengan ketiga indikator sebelumnya yang menunjukkan kondisi relatif kondusif, indikator struktur birokrasi mengungkap adanya kesenjangan antara praktik lapangan dan formalitas prosedural. Kepala SPPG secara terbuka menyampaikan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dan baku yang mengatur secara rinci mekanisme penerimaan, pendistribusian, dan pelaporan program. Arahan teknis kepada staf dan sekolah mitra sejauh ini masih disampaikan secara lisan berdasarkan pengalaman operasional yang terakumulasi sejak unit SPPG tersebut beroperasi.

Meskipun demikian, ketiadaan SOP tertulis tidak berarti pelaksanaan berlangsung tanpa kendali sama sekali. Penelitian ini menemukan bahwa pengendalian mutu tetap berjalan secara konsisten melalui dua instrumen praktis, yaitu surat jalan atau bukti serah terima yang mencatat kuantitas dan waktu pengiriman, serta lembar uji organoleptik yang mengevaluasi aroma, warna, rasa, dan tekstur makanan sebelum didistribusikan kepada peserta didik. Kedua instrumen ini secara fungsional menjalankan peran yang semestinya diformalkan dalam SOP, namun keberlangsungannya masih bergantung pada konsistensi individu pelaksana, bukan pada aturan tertulis yang mengikat secara institusional. Kondisi ini sejalan dengan peringatan Edwards III (1980) bahwa struktur birokrasi yang minim formalisasi prosedur berisiko menimbulkan inkonsistensi praktik apabila terjadi pergantian personel atau perluasan skala layanan di masa mendatang.

4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Analisis lintas-informan mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung utama, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di tingkat sekolah melalui peran PIC dan guru pendamping, disposisi positif yang merata di kalangan pelaksana dan penerima manfaat, serta pola

komunikasi antarlembaga yang telah terjalin melalui kombinasi pertemuan langsung dan platform digital. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan menjadi fondasi bagi keberlangsungan program pada level operasional harian.

Di sisi lain, faktor penghambat yang teridentifikasi bervariasi menurut perspektif informan. Kepala Madrasah menyoroti keterbatasan variasi menu makanan yang menimbulkan kejenuhan pada sebagian peserta didik, meskipun menegaskan bahwa infrastruktur sekolah bukan merupakan kendala berarti. Kepala SPPG mengungkapkan bahwa tantangan utama justru terletak pada ketersediaan bahan baku berkualitas secara konsisten dari pemasok, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak untuk memperkaya variasi menu meski permintaan akan hal tersebut cukup tinggi. Wali murid menambahkan sorotan pada aspek ketepatan waktu distribusi yang belum selalu konsisten, kesesuaian menu dengan selera anak, serta pentingnya penguatan komunikasi dan kualitas makanan secara berkelanjutan. Sintesis atas ketiga perspektif ini menunjukkan bahwa akar persoalan utama bersumber dari sisi hulu rantai pasok bahan baku, yang berimplikasi domino pada variasi menu di sisi hilir dan pada akhirnya memengaruhi persepsi penerima manfaat di tingkat sekolah.

4.7 Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap keempat indikator Edwards III menunjukkan pola implementasi yang tidak seragam: tiga indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi) menunjukkan kondisi yang relatif kondusif, sementara satu indikator (struktur birokrasi) menunjukkan celah yang memerlukan perhatian serius. Pola ini konsisten dengan argumen Edwards III (1980) bahwa keempat indikator saling berinteraksi secara sistemik, sehingga kekuatan pada satu indikator dapat menutupi sementara kelemahan pada indikator lain namun tidak menghilangkan risiko jangka panjangnya.

Temuan mengenai kuatnya disposisi dan komunikasi informal sejalan dengan hasil survei Wijayanto dan Azizah (2024) yang menemukan bahwa satuan pendidikan berbasis keagamaan di Jawa Timur unggul pada dimensi kesiapan sosial-komunitas dibandingkan sekolah umum negeri, sebuah modal sosial yang tampaknya menjadi ciri khas madrasah pedesaan. Di sisi lain, temuan mengenai absennya SOP tertulis memperkuat catatan Fitriani dan Hasanah (2022) pada studi PROGAS, yang juga mengidentifikasi koordinasi antarlembaga sebagai titik kritis efektivitas program gizi sekolah. Implikasi praktisnya, penguatan implementasi MBG di madrasah pedesaan lebih mendesak memerlukan formalisasi

prosedur kerja yang telah berjalan secara informal, guna menjaga konsistensi praktik di tengah kemungkinan pergantian personel atau perluasan cakupan layanan ke depan.

4.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada satu situs tunggal dengan empat informan, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara statistik meskipun transferabilitas konseptualnya tetap terbuka bagi konteks madrasah pedesaan yang serupa; penelitian juga bersifat cross-sectional dan belum menangkap dinamika implementasi secara longitudinal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di MI Mambaul Huda Desa Banjarsari secara umum telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang digariskan pemerintah pusat. Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi antara SPPG dan sekolah berjalan efektif melalui kombinasi pertemuan langsung dan grup koordinasi digital, meskipun komunikasi formal kepada wali murid masih memerlukan penguatan. Pada indikator sumber daya, pelaksanaan program ditopang oleh ketersediaan tenaga pelaksana yang memadai, terutama melalui peran strategis Penanggung Jawab di tingkat sekolah dan keterlibatan aktif guru kelas. Pada indikator disposisi, seluruh pemangku

kepentingan yang diteliti menunjukkan sikap penerimaan dan komitmen yang positif terhadap keberlangsungan program. Pada indikator struktur birokrasi, meskipun Standar Operasional Prosedur tertulis belum tersedia secara formal, praktik pengendalian mutu di lapangan tetap berjalan secara konsisten melalui instrumen surat jalan dan lembar uji organoleptik.

Faktor pendukung utama keberhasilan implementasi adalah kombinasi sumber daya manusia yang memadai dan disposisi positif yang merata di kalangan pelaksana, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan variasi menu yang bersumber dari ketidakstabilan pasokan bahan baku berkualitas serta persoalan ketepatan waktu distribusi pada momen-momen tertentu.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi. Pertama, unit SPPG Malang Ngajum Banjarsari 3 disarankan menyusun Standar Operasional Prosedur tertulis dan formal yang mencakup mekanisme penerimaan, pendistribusian, dan pelaporan, guna memastikan konsistensi praktik pengendalian mutu yang selama ini telah berjalan secara informal. Kedua, pihak SPPG disarankan memperluas jaringan pemasok bahan baku untuk mengatasi keterbatasan variasi menu tanpa mengorbankan standar gizi yang telah ditetapkan. Ketiga, MI Mambaul Huda Banjarsari disarankan

mempertahankan dan memperkuat peran aktif guru dan Penanggung Jawab dalam mendampingi pelaksanaan program, sekaligus membangun saluran komunikasi formal yang lebih terstruktur kepada wali murid. Keempat, peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah

penelitian atau jumlah informan, serta mempertimbangkan desain penelitian longitudinal, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis pada konteks madrasah pedesaan secara lebih luas.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Metode	Titik Beda dengan Penelitian Ini
Fitriani & Hasanah (2022)	Implementasi PROGAS, Kab. Malang	Kualitatif, Edwards III	Program berbeda (PROGAS); lokus SD Negeri
Nurhayati (2022)	Peran sosial MI dalam pemberdayaan desa	Etnografis	Tidak mengkaji kebijakan gizi
Hidayat & Wulandari (2024)	Kesiapan awal kebijakan MBG nasional	Desk research, FGD	Kajian makro, bukan studi lapangan mikro
Setyawati & Purnomo (2021)	Evaluasi PMT, Kec. Kepanjen	Model CIPP	Evaluasi program, bukan analisis implementasi
Wijayanto & Azizah (2024)	Kesiapan 320 sekolah menyambut MBG	Survei kuantitatif	Multisitus, tahap kesiapan bukan proses implementasi

Sumber: Diolah peneliti, 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1979). *Public policy-making* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding public policy* (4th ed.). Prentice-Hall.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, A. R., & Hasanah, U. (2022). Implementasi Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) di Kabupaten Malang: Analisis kebijakan dan efektivitas pelaksanaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112–126.
- Hidayat, A., & Wulandari, S. (2024). Awal implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1), 45–60.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. Kemenkes RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, F. (2022). *Peran Madrasah Ibtidaiyah dalam pemberdayaan masyarakat desa: Studi di Kabupaten Malang*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 33–48.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy* (2nd ed.). Dorsey Press.
- Setyawati, R., & Purnomo, A. (2021). Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 88–101.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Rev. ed.). Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wijayanto, H., & Azizah, N. (2024). *Kesiapan satuan pendidikan dalam menyambut Program Makan Bergizi Gratis: Survei awal di Jawa Timur* [Working paper]. Pusat Studi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.